E-ISSN 3047-0714
P-ISSN 3047-1451

Volume 2 Nomor 1 2024

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE ON
INDONESIAN PHILOSOPHY AND THEOLOGY
"Filsafat Kontekstual Indonesia"
Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Nilai-Nilai Pancasila dalam Ajaran Kearifan Lokal Islam Masade

Imaduddin Fadhlurrahman [a,1]
[a] *Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia*
[1] imaduddin.fadhlurrahman@mail.ugm.ac.id

Kata Kunci:
Islam Masade, Etika Pancasila, dan Nilai-Nilai Etika.

Abstrak

Penelitian mengenai ajaran Islam Masade di Sangihe, Sulawesi Utara merupakan suatu upaya untuk memahami Islam Masade sebagai kepercayaan lokal dan mengidentifikasi nilai-nilai etis yang terkandung dalam ajaran Islam Masade. Inti ajaran dari Islam Masade adalah ketaatan kepada Tuhan. Kesempurnaan dalam ajaran Islam Masade ketika melaksanakan ajaran dan perintah Tuhan. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Etika Pancasila karena merupakan suatu visi etika dalam kehidupan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode hermeneutika filosofis. Sumber-sumber primer dan sekunder diteliti menggunakan unsur-unsur antara lain dekripsi, verstehen, hermeneutika, dan refleksi kritis. Objek material dalam penelitian ini adalah Islam Masade. Objel formal dalam penelitian ini adalah Etika Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Nilai-nilai etis yang terdapat dalam ajaran Islam Masade adalah Nilai Religius, Nilai Adat-istiadat Kebudayaan, dan Nilai Kenegaraan yang apabila ditinjau dari Etika Pancasila akan menemukan Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan. Nilai-nilai etis tersebut penting dalam kehidupan bangsa karena sejalan dengan visi etika Pancasila.

DOI: https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8490
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/senafil
Email: seminafilsafat.teo@usd.ac.id

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.
To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Pancasila Values in the Local Wisdom Teachings of Islam Masade

Keywords:
Islam Masade, Pancasila Ethics, ethical values.

Abstract
Research on the teachings of Islam Masade in Sangihe, North Sulawesi is a study to understand Islam Masade as a local belief and to assess the ethical values contained in the teachings of Masade Islam. The core teaching of Islam Masade is obedience to God. Perfection in the teachings of Islam Masade when carrying out the teachings and commands of God. The perspective used in this study is the Pancasila Ethics because it is an ethical vision in life. This research is a library research using philosophical hermeneutics method. Primary and secondary sources were examined using elements including decryption, verstehen, hermeneutics, and critical reflection. The object of this research is Islam Masade. The formal object in this research is Pancasila Ethics. The results showed the following: Ethical values contained in the teachings of Islamic Masade are Religious Values, Cultural Values, and State Values in terms of the Pancasila Ethics will find God Values, Human Values, Unity Values, Social Values, and Fairness Values. These ethical values are important in national life because they conflict with the ethical vision of Pancasila.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang pluralistik karena menyimpan keanekaragaman dalam hal agama, etnis, seni, tradisi, budaya, pandangan, dan cara hidup. Indonesia memiliki beragam nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat yang menjadikannya sebagai negara paling multikultural.[1] Nilai-nilai tersebut berwujud di dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap ramah tamah, gotong royong, sopan santun, rela berkorban, memiliki etos kerja yang baik, saling menghormati, dan toleransi. Kearifan lokal juga dapat berbentuk budaya yang mengacu kepada lokalitas, yang tumbuh dan berkembang sebagai praktik yang khas dalam masyarakat, dipercayai, dan diakui memiliki fungsi penting dalam tatanan sosial masyarakat. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan dan pengetahuan asli suatu masyarakat yang berawal dari nilai luhur tradisi

[1] Dr. Yohan M.Si., "Kata Pengantar: Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI" dalam *Imajinasi Nusantara: Budaya Lokal dan Pengetahuan Tradisional dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer* diedit oleh Arif Susanto, dkk., (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, 2021), vii.

budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana. [2]

Kearifan lokal memiliki sifat lokal yang bermakna bahwa masing-masing kearifan lokal punya ciri khasnya yang membedakan antara suku lainnya. Perbedaan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi tempat dan waktu yang berbeda serta tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda pula. Namun meski kearifan lokal bersifat lokal, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat bersifat lintas budaya sehingga membentuk kearifan lokal yang bersifat nasional.

Realitas kearifan lokal yang multi dalam tubuh bangsa Indonesia merupakan fenomena yang tidak bisa disangkal. Perbedaan tersebut adalah ciri khas yang menjadi identitas bangsa yang majemuk. Masing-masing etnis di Indonesia hadir dengan keanekaragaman kearifan lokalnya masing-masing yang membentuk satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Bukti persatuan tersebut tercantum dalam Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa. Sebab Pancasila itu sendiri sumber dari kearifan lokal bangsa yang memuat nilai-nilai yang diantaranya adalah nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.[3]

Pancasila bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Pancasila berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia yang kental akan kearifan lokalnya. Sehingga Pancasila itu sendiri merupakan jiwa bangsa dan kepribadian bangsa karena nilai-nilainya berusmber dari bumi Indonesia.[4]

Islam Masade merupakan salah satu kepercayaan lokal di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang sarat akan nilai-nilai kearifan lokal. Penganut kepercayaan ini terbatas dan hanya tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Utara. Kelompok ini mempercayai bahwa Allah Yang Maha Esa itu ada, dan Muhammad SAW., sebagai utusan Allah, semacam syadahat secara lisan. Pemahaman mengenai Islam memiliki sedikit perbedaan pada tata cara (*syariat*) dalam beribadah, khususnya ibadah *mahdhah* kepada Allah. Mereka tetap memiliki inti ajaran yang sama dengan Islam *"normatif"* yakni menyembah kepada Allah SWT., dan menghormati sesama manusia tanpa adanya perbedaan.

Mainstream agama – Islam *normatif* – yang menjadi doktrin utama merupakan penghalang bagi kelompok minoritas ini untuk diakui sebagai sebuah "agama"/ padahal banyak "agama" lokal yang diakui oleh instansi lembaga keagamaan, pendidikan, dan sosial di Indonesia. Beberapa contoh agama yang diakui karena kearifan lokalnya misalnya *Islam Wettu Tellu* di

[2] Dian Uli Anastasia L. Tobing dkk., "Filsafat Pancasila Dalam Konsep Filosofis "Dalihan Na Tolu" Masyarakat Adat Batak Toba," *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3, no.2 (2023), 35.

[3] Agustinus W. Dewantara, *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 91.

[4] Armada Riyanto, dkk., *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat "Keindonesiaan"* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 18.

Kepulauan Nusa Tenggara, dan *Towani Tolotang* serta *Ammatoa* di daerah Sulawesi Selatan. Pengakuan inilah yang kemudian menahan para penganut ajaran *masade* untuk mendapatkan identitas sebagai penganut agama yang legal. Formalisasi dan deformalisai merupakan perkembangan yang dialektis dari suatu kebudayaan. Persinggungan tersebut dalam wilayah kerohanian menjadi sebuah gejala yang tak terpungkiri.[5]

Fatur Rahman Lahindah, Albert W. S. Kusen, dan Nasrun Sandiah dalam jurnalnya menuliskan bahwa sejarah *Islam Masade* hingga kini masih bersifat tradisi lisan yang belum dipercaya kebenaran-nya secara Ilmiah. Penyebutan masyarakat Sangihe kala itu hanya mengenal nama Islam saja entah itu Islam yang berasal dari daerah Filipina maupun Ternate. Beberapa laporan Misionaris Barat pun (abad XVI – XVII) istilah Islam Tua tidak ditemukan. Kedua nama yang berlabel Islam di atas hanya disebut nama Islam saja.[6]

Sejarah Islam Masade sendiri tidak lepas dari proses sejarah islamisasi di daerah Sangihe. Salah satu sejarah kongkrit bahwa Islam adalah agama yang pertama masuk dalam kehidupan masyarakat Sangihe dengan bukti peninggalan kerajaan Kendahar di Kepulauan Sangihe. Raja kerajaan Kendahar Syah Alam telah memeluk agama Islam pada saat itu.[7] Masuknya agama Islam di kepulauan Sangihe lewat dari perdagangan dan hubungan kekerabatan yang terjalin antara Islam Filipina.[8]

Sejarah mengenai *Islam Masade* (Islam Tua) sendiri tidak lepas dari sosok Imam Masade yang sering disebut-sebut sebagai Mawu Masade. Penyebutan ini menjadi silang pendapat dengan Islam yang lainya. Penganut Islam sendiri berpandangan bahwa hal ini mengingkari rukun Iman di mana percaya tiada Tuhan selain Allah SWT sehingga sampai saat ini debat teologis dengan komunitas *Islam Masade* belum bisa diperdamaikan. Masyarakat penganut ajaran Islam Tua menurut tradisi lisan berawal dari ditemukannya seorang bayi laki-laki di tengah hutan oleh pasangan suami-istri yang hendak pergi ke kebun. Mereka memberi nama bayi laki-laki itu dengan nama Mawu Masade. Ketika Masade beranjak usia 16 tahun, ia berpamitan dengan kedua orang tuanya untuk pergi ke Tugis dengan seorang teman yang bernama Valentijn. Setelah belajar tentang ajaran Islam Tua, pada usia 66 tahun Masade pulang kembali ke pulau Sangihe dan ditemuinya sahabat karibnya pendeta Valentjin (Brenteley)

---

[5] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan: Islam Masade di Kepulauan Sangir.* (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), 5.

[6] Patur Rahman Lahind, dkk. "Islam Masade Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Holistik* 11, no. 21 (2018).

[7] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan*, 5.

[8] Patur Rahman Lahind, dkk. "Islam Masade Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe,".

ditangkap oleh rakyat Ternate.[9] Rakyat Ternate menganggap sebagai aksi balas dandam terhadap tindakan Portugis yang telah membunuh raja mereka, Sultan Hairun.[10] Masade setelah mengetahui hal itu pun menyumpahi tanah Ternate dengan mengatakan bahwa setelah sembilan hari tanah Ternate akan dimurkai Tuhan. Masade setelah mengatakan hal itu kembali ke pulau Sangihe, ke desa kelahirannya. Ia kemudian berpamitan dengan kedua orang tuanya, ia mengatakan bahwa ia tidak akan berdiam diri di pulau Sangihe. Mawu Masade akhirnya kembali ke Tugis dan mendalami Ilmu sambil mengajarkan Ilmu kepada muridnya Pananging. Masade menjelang kematianya menyerahkan tongkat penyebaran Islam Tua kepada Pananging.[11]

Masyarakat Islam Tua sendiri dalam kehidupan sangat menghormati sosok Mawu Masade, disebabkan hal-hal yang dilakukan dalam kehidupanya adalah sebuah kitab hidup yang dapat dicontoh. Sosok Imam bagi masyarakat *Islam Masade* merepresentasikan ajaran mereka, bahkan sosok Imam sendiri disimbolkan sebagai "kitab suci yang berjalan". Ajaran *Islam Masade* sendiri terlepas dari hal di atas mendapat pengaruh dari daerah Filipina, di mana daerah Tugis yang menjadi pusat pembelajaran Masade yang juga merupakan pusat penyebaran Islam Syi'ah. Keunggulan Islam syi'ah ialah tolerannya terhadap tradisi lokal. Hal ini berbeda dengan perkembangan Islam Ternate yang tidak toleran terhadap tradisi lokal.[12] Proses Islamisasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Sangihe kala itu, berawal dari ketika daerah Sangihe dahulu mendapat pengaruh besar dari Kesultanan Sulu dan Ternate, di mana Kesultanan Sulu pernah mengutus seorang utusan yang bernama Samangsialang, Syam Syah Alam untuk mempengaruhi.

Islam Masade dalam praktiknya masih menyisakan persoalan etis karena dipandang sebagai sebuah agama lokal yang tidak utuh karena berbeda dengan ajaran Islam yang universal (*normative*). Keberadaan *Islam Masade* sendiri merupakan hasil akulturasi dari kearifan lokal yang ada di Kepulauan Sangihe yang berumur jauh lebih tua. Stigma sesat kemudian juga dibangun oleh masyarakat lain sebagai sebuah konstruksi sosial. Pandangan-pandangan yang relevan dibutuhkan sebagai kacamata dalam menjawab persoalan etis yang ditimbulkan. Kuntowijoyo (2006: 38) menyebutkan bahwa perlu adanya pembelajaran mengenai unsur akronik, bentuk sinkronik, dan perkembangan diakronik dari agama yang menggejala di masyarakat. Kelompok ini tetap eksis menjaga dan

[9] Patur Rahman Lahind, dkk. "Islam Masade Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe."

[10] Patur Rahman Lahind, dkk. "Islam Masade Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe."

[11] Patur Rahman Lahind, dkk. "Islam Masade Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe."

[12] Patur Rahman Lahind, dkk. "Islam Masade Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe."

mempertahankan tradisi melalui ritual keagamaan yang menjadi *lokal wisdom* sebagai penanda dari idetitasnya.

Pancasila sebagai ukuran etika dalam pandangan hidup bangsa sekaligus pedoman pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, memiliki pandangan dan ukuran sendiri dalam menanggapi persoalan yang ada. Nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila mencakup semua aspek dalam kehidupan bernegara, mulai dari: nilai religi, hak asasi manusia, persatuan bangsa, keadilan hingga musyawarah. Nilai-nilai tersebut harus ada atau setidaknya mewakili setiap kebijakan yang ada di Indonesia. Kaelan[13]mengungkapkan bahwa keberadaan Pancasila itu sendiri pun lahir bukanlah berdasarkan pada pemikiran dari para individu manusia, melainkan lahir atas realitas sosial, budaya, adat-istiadat, wilayah geografis serta kehidupan keagamaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sebelum terbentuk sebagai suatu negara.

Etika Pancasila memiliki pandangan bahwa tolak ukur dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila adalah moralitas. Etika dan moral bagi manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa bersifat rasional. Ini mengindikasikan bahwasanya etika serta moral yang terkandung pada Pancasila, tidak diletakkan untuk manusia secara pribadi, tetapi secara relasional berhubungan dengan yang lain[14], meskipun etika individual memiliki persinggungan terhadap ranah sosial. Etika Pancasila membahas hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi dan keadilan sosial serta memberi batasan-batasan moral yang menjadi latarbelakangnya. Etika Pancasila melihat hal tersebut dapat digunakan sebagai sudut pandang dalam telaah segala kebijakan yang ada di Indonesia termasuk melihat eksistensi dari *Islam Masade*.

Islam Masade sendiri adalah akulturasi dan asimilasi dari kearifan lokal Bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa yang bersumber dari kearifan lokal. Tinjauan Etika Pancasila diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap keberadaan agama-agama lokal, dalam hal ini *Islam Masade*. Kajian nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai pandangan etis diharapkan mampu memberikan pengertian dalam setiap tingkah laku kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Nilai-nilai etis yang terkandung dalam ajaran *Islam Masade* harapannya dapat dituangkan ke dalam tindakan aplikatif terutama yang menyangkut kepada hal-hal yang bernilai etis dan mengandung norma-norma sosial.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian filsafat yang bersifat deskriptif kualitatif dengan model pendekatan dekripsi, verstehen, hermeneutika, dan

[13] Kaelan, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2018), 55.

[14] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2018)

refleksi kritis. Penelitian ini diperkuat dengan studi pustaka dan literatur yang berfokus pada hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.[15] Bahan utama yang digunakan sebagai sumber adalah kepustakaan yang meliputi ajaran Islam Masade serta Pancasila. Bahan-bahan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka berupa buku-buku, jurnal penelitian dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang komperhensif. Objek material di dalam penelitian ini adalah ajaran Islam Masade serta kandungan nilai di dalamnya. Objek formal dalam penelitian ini adalah Etika Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila Sebagai Etika

Pancasila sebagai etika merupakan sebuah pandangan hidup mengandung makna ajaran filsafat moral atau filsafat kesusilaan yang berdasarkan atas kepribadian, ideologi, jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Etika Pancasila merupakan etika yang berdasarkan atau berpedoman pada norma-norma yang bersumber dari ajaran Pancasila. Inti atau hakikat dari ajaran Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Refleksi kritis Etika Pancasila meliputi tiga bidang. Pertama, Etika Pancasila melakukan refleksi kritis tentang norma dan nilai moralitas yang telah dijalani atau dianut oleh warga bangsa Indonesia selama ini agar dapat dirumuskan menjadi prinsip-prinsip kelayakan hidup sehari-hari, misalnya nilai-nilai yang terkandung di dalam benda-benda peninggalan sejarah, karya sastra, dan cerita rakyat. Kedua, Etika Pancasila melakukan refleksi kritis tentang situasi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala keunikan dan kompleksitasnya seperti telah dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Ketiga, refleksi kritis tentang berbagai paham yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tertentu tentang bidang-bidang khusus kehidupan, misalnya paham tentang manusia, Tuhan, alam, masyarakat, sistem sosial politik, sistem ekonomi, sistem kerja, dan sebagainya.[16]

Etika Pancasila mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Unsur-unsur yang membangunnya ialah nilai dan keutamaan moral bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, da keadilan yang terbentuk oleh pembelajaran dari kenyataan sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia yang panjang. Nilai-nilai Pancasila merupakan buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik dalam menghadapi diri sendiri, sesama dan lingkungan hidup serta

[15] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005).

[16] Sri Soeprapto, *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro* (Yogyakarta: UNY Press, 2017), 164.

ketaatan pada Tuhan. Nilai-nilai Pancasila adalah tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak, ciri khas masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat dan bangsa lain.

Etika Pancasila mengandung penilaian untuk menilai suatu perilaku baik apabila bertujuan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik atau akibat yang baik, dan buruk jika sebaliknya. Artinya Pancasila berperan sebagai pedoman bagi warga bangsa Indonesia dalam usaha untuk mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Permasalahan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan masa modernisasi di masa depan yang penting mendapat perhatian adalah pengembangan sistem nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang substansial adalah nilai-nilai utama yang tetap akan menjadi kepribadian bangsa sepanjang masa. Implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 194 akan menjadi pedoman pokok secara umum kolektif untuk semua warga bangsa dan negara Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam peraturan-peraturan resmi kenegaraan harus selalu menampung perubahan yang sesuai dengan gejolak perubahan zaman yang semakin modern.[17]

Nilai-nilai Pancasila untuk hadir sebagai suatu sistem nilai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiap sila memiliki kandungan maknanya masing-masing, namun tetap saling berkaitan satu sama lain. Kelima sila tersebut membentuk sinergitas yang menghadirkan paradigma etis bagi masyarakat Indonesia. Paradigma yang berakar dan diperuntukkan oleh manusia-manusia Indonesia.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai empat sila yang lain, sehingga Negara Republik Indonesia meskipun bukan lembaga agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukun yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis). Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia.[18]

Ketuhanan sebagai esensi sila pertama yakni hakekat dari Tuhan secara ontologis yakni meyakini adanya kekuasaan Tuhan baik dari penciptaan-Nya maupun dari pengabulan doa-doa sehingga manusia meyakini adanya Tuhan yang Maha Sempurna.[19]

Perwujudan dari ketuhanan yang welas asih membangun suasana kejiwaan yang mendorong para pemeluk agama untuk dapat berlomba-

[17] Sri Soeprapto, 166.

[18] Sri Soeprapto, 87.

[19] Linton Naibaho, dkk., "Ontologi Filsafat Pancasila Di Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang" *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3, no. 2 (2023): 28.

lomba berbuat kebajikan dengan enjalankan peran sosial secara bertanggung jawab, jujur, dan bersih.[20]

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Isi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab didasarkan kepada hakikat manusia. Hakikat manusia terdiri dari tubuh dan jiwa yang merupakan dua aspek dari satu substansi yang saling berhubungan seperti hubungan antara *materia prima* dan bentuk (*forma*) atau antara potensi dan aktus. Tubuh adalah *materia prima*, sedangkan jiwa adalah aktusnya. Hakikat manusia sebagai satu kesatuan mengandung bawaan mutlak untuk dijelmakan dalam perbuatan lahir dan batin, yaitu tabiat saleh atau watak saleh dan pribadi saleh. Hal ini merupakan bentuk tertinggi dari perbuatan dan tindakan manusia.[21]

Keterkaitan nilai antar sila pada Pancasila membuat sila Kemanusiaan yang adil dan beradab didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa dan mendasari sila Persatuan Indonesia. Isi kandungannya yakni mengandung keempat sila lainnya sehingga menghasilkan makna sila kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradap, berkerakyatan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sila kedua mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang bersumber pada hakikat manusia.[22]

Sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga Persatuan Indonesia terdiri atas dua padanan kata yaitu Persatuan dan Indonesia. Inti pokok sila ketiga adalah persatuan yang terdiri dari akar kata 'satu' dan 'per-/-an.' Makna persatuan secara morfologi berarti suatu hasil dari perbuatan, jadi merupakan nomina. Ditinjau dari sudut dinamikanya pengertian persatuan yaitu proses yang dinamis. Indonesia merupakan suatu kuantitas yaitu persatuan untuk wilayah, bangsa dan negara Indonesia.[23]

Pembukaan UUD 1945 di alinea II disebutkan bahwa "perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pengertian persatuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan faktor yang penting dan sangat menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia sehingga persatuan merupakan

[20] Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan* (Jakarta: Mizan, 2017), 101.

[21] Sri Soeprapto, *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*, 89-90.

[22] Kaelan, *Filsafat Pancasila*, 161.

[23] Kaelan, 179.

sesuatu yang mutlak untuk mewujudkan suatu negara dan bangsa dalam mencapai tujuan bersama.[24] Rakyat Indonesia sebagai keseluruhan penjumlahan semua orang Indonesia memiliki tanah air tersebut, sehingga mempunyai tempat tersendiri di atas bumi terpisah dari manusia lain. Persatuan dan kesatuan bangsa harus dipelihara, dipererat, dan diperkembangkan dalam arti agar perbedaan-perbedaan yang saling mempunyai daya penarik saling melengkapi untuk memperkaya kehidupan, sedangkan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan pertentangan agar dipersatupadukan dalam suatu resultan atau sintesis.[25]

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hidmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung dua makna filsafat. Pertama, kerakyatan yang berkembang bahwa negara adalah alat bagi kebutuhan seluruh rakyat dan cita-cita demokrasi sosial ekonomi. Kedua, musyawarah atau demokrasi berkedaulatan rakyat dijelmakan sebagai asas politik negara di mana negara berkedaulatan rakyat sebagai cita-cita politik yang mengandung tiga unsur, yaitu negara untuk seluruh rakyat, demokrasi sosial ekonomi, dan demokrasi politik. Dasar filsafat dan politik negara berisi tiga unsur pokok yaitu kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan, dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah bentuk penjelmaan dua unsur pokok lainnya yang sebelumnya hanya merupakan dasar filsafat atau dasar kerohanian yang kemudian juga menjadi dasar politik.[26]

Penjelmaan sila keempat tersebut lalu dijadikan sebagai pedoman etis untuk mewujudkan cita-cita politik baik dari unsur kerakyatan maupun unsur permusyawaratan/perwakilan. Dasar politik yang terbangun menjadi jauh lebih luas karena bersandar pada kedaulatan rakyat. Rakyat di dalam negara adalah pendukung kekuasaan tertinggi, di dalamnya tersimpul demokrasi, termasuk demokrasi politik dan keduanya dalam kedudukan dan makna sebagai cita-cita politik.[27]

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila keadilan sosial dilandasi sifat manusia yang monopluralis yaitu keseimbangan yang dinamis. Oleh karena itu, konsekuensinya kepentingan individu dan kepentingan umum harus dalam waktu keseimbangan yang dinamis, harus sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman.[28]

Landasan keseimbangan dan pemaknaannya sebagai sebuah tujuan, maka sila kelima ingin mencapai suatu keadilan Pancasila. Tentang

[24] Kaelan, 180.

[25] Sri Soeprapto, *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*, 95.

[26] Sri Soeprapto, 102.

[27] Sri Soeprapto, 103.

[28] Kaelan, *Filsafat Pancasila*, 221.

hubungan hidup dan hubungan keadilan di antara sesama manusia, tetapi di dalamnya seharusnya terselenggara keadilan dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu keadilan religius, serta keadilan dalam hubungan hidup terhadap diri sendiri atau keadilan pribadi agar terlaksana penjelmaan segenap unsur hakikat manusia dalam kesatuan monopluralis. Keadilan sosial menyimpulkan salah satu unsur pokok pokok kehidupan etis yang bersifat kodrat, moral, ideal atas dasar cita-cita yang ideologis dan politis, yang bersifat religius atas dasar firman Tuhan.[29]

Prinsip-Prinsip Etika Pancasila

Pluralisme

Istilah pluralisme digunakan secara beragam dan karenanya sedikit banyak perlu dijernihkan. Ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk meruk pada tata kelola masyarakat yang beragam, misalnya multikulturalisme, komunitarianisme, pluralisme kultural, dan sebagainya. Terlepas dari sejarahnya masing-masing, tiap istilah menggambarkan tanggapan atas isu keberagaman, meskipun pada akhirnya akan sangat sulit untuk menentukan definisi mana yang benar. kata "pluralisme" sendiri dalam wacana non-teologis juga memiliki beragam pengertian. Ada yang menggunakannya cukup netral (misalnya John Bowen ketika menyebut "pluralisme normatif"; ada yang memaksudkannya sebagai suatu tanggapan khas yang tidak mesti terkait dengan agama (misalnya istilah "pluralisme gender", untuk mengacu pada pandangan yang mengakui adanya keragaman gender).[30]

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, kelompok, budaya, serta terutama agama. Dengan demikian, maka kemajemukan adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakkan oleh masyarakat Indonesia. Keragaman terdapat di berbagai ruang kehidupan, termasuk kehidupan agama. Pluralitas bukan hanya terjadi dalam lingkup kelompok sosial, namun juga kehidupan negara, bangsa, budaya serta kehidupan agama. Bahkan di dalam keluarga sekalipun memiliki keanekaragamannya masing-masing sebab keluarga juga bagian dari elemen kehidupan sosial. Selain itu, pluralitas juga dapat terjadi dalam suatu kehidupan agama tertentu terutama dalam level penafsiran atas ajaran agama. Pluralitas pada wilayah ini pada gilirannya akan melahirkan pluralitas pada level aktualisasi dan pelembagannya.[31]

Pluralisme dalam bahasan etika Pancasila memusatkan perhatian bagaimana masyarakat, yang terdiri dari kelompok-kelompok identitas yang berbeda dapat hidup bersama, khususnya dalam ikatan konteks suatu

[29] Sri Soeprapto, *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*, 109.

[30] Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan* (Bandung: Mizan, 2011), h. 28.

[31] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 155.

negara-bangsa yang mempersatukan kelompok-kelompok berbeda. Titik berangkatnya adalah pluralisme struktural minimal bahwa masyarakat terdiri dari unsur-unsur yang bersaing satu dengan lainnya seperti agama, suku bangsa, dan pemerintahan. Kesadaran tersebut mendorong tergeraknya keinginan untuk menemukan aturan main bersama.[32]

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah sebagai sebuah institusi yang menaungi ataupun manusia lainnya yang hidup dalam satu entitas yang sama. Pancasila mengamini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama terlepas dari mana asalnya. Manusia memiliki budi sendiri dan karsa yang merdeka. Semua manusia mempunyai apa yang disebut sebagai martabat dan derajat yang sama. Oleh karenanya, tiap-tiap manusia tanpa terkecuali secara umum memiliki hak dan kewajiban yang sama pula.

Indonesia yang berlandaskan Pancasila ditegaskan Soekarno bahwasanya rumusan hak-hak dasar manusia berbeda dengan falsafah bangsa lain. Manusia sebagai makhluk individu dan juga sosial artinya memiliki kedaulatan di tangannya sendiri. Rumusan itu menurut dasar dan sistem kekeluargaan, maka kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Asasnya yaitu gotong royong atau berasas falsafah hidup bersama-sama di dunia ini, manusia yang satu dengan manusia yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain dan selanjutnya. Sehingga implementasinya ke dalam hidup berbangsa dan bernegara ialah kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak ada diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama, dan keturunan setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama. Namun, warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sehingga hak dan kewajiban berjalan bersama-sama.[33]

Solidaritas Bangsa

Kodrat Manusia selalu terikat atau hidup dalam suatu kelompok dan masyarakat manusia. Masyarakat itu dapat berwujud suku, kota, atau bangsa. Bersama dengan keterikatan dalam suatu entitas masyarakat tertentu sebagai anggota, perlu disadari juga bahwa terdapat orang lain di luar kumpulan masyarakat tersebut.[34] Indonesia yang berlandaskan Pancasila meskipun berisi manusia yang berasal dari ragam kelompok masyarakat berbeda, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu Bangsa dan Negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah

[32] Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan*, 30-31.

[33] Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 109-117.

[34] Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 80.

perbedaan yang bertentangan tetapi justru keanekaragaman yang bersatu dalam suatu sintesa yang pada gilirannya memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa Indonesia.[35]

Tumbuh dan berkembangnya persatuan suatu bangsa menjadi solid karena dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi yaitu kekuasaan fisik (lahir) atau disebut juga kekuasaan materialis yang berupa kekerasan, paksaan. Kekuasaan idealis yang berupa nafsu psikis, moral, ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan. Proses persatuan yang dikuasai oleh aspek kekuasaan fisik (lahir) akan tumbuh berkembang menjadi bangsa yang materialis. Sebaliknya proses persatuan yang didasari oleh kekuasaan batin (kejiwaan) maka akan tumbuh berkembang menjadi negara utopis idealis yang jauh dari realitas bangsa dan negara oleh karena itu bagi bangsa Indonesia yang berprinsip persatuan itu tidak tidak bersifat berat sebelah, tetapi justru merupakan suatu sintesis yang harmonis dan serasi baik hal-hal yang sifatnya lahiriah maupun hal-hal yang sifatnya batiniah. Prinsip tersebut adalah yang paling sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis yang terkandung dalam Pancasila.[36]

Oleh karena itu bangsa pada hakikatnya adalah penjelmaan dari sifat kodrat manusia tersebut di dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini disadari bahwa manusia tidak bisa hidup menyendiri, sehingga senantiasa memerlukan orang lain. Suatu bangsa bukanlah merupakan manifestasi kepentingan individu saja yang diikat secara imperatif dengan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dilakukan negara liberal. Demikian juga suatu bangsa bukanlah suatu totalitas kelompok masyarakat yang menenggelamkan hak-hak individu sebagaimana yang terjadi pada bangsa sosialis komunistis. Kesatuan bangsa jauh lebih kompleks, ia terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir serta akar-akar yang terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang.[37]

Demokrasi

Prinsip negara sebagaimana terkandung dalam pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun disandarkan pada peraturan hukum, tetapi juga harus berdasarkan kepada nilai-nilai etis. Negara Indonesia mendasarkan pada komitmen moral religius serta moral kemanusiaan yang beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikatnya untuk mencapai tujuan kemanusiaan bermartabat luhur. Hal inilah yang menjadi basis

[35] Kaelan, *Filsafat Pancasila*, 185.

[36] Kaelan, *Filsafat Pancasila*, 186

[37] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 18-19

filosofis penggerak pemerintahan yang mana sumbernya berasal dari *core values* Pancasila.[38] Nilai-nilai itu diambil dan dijabarkan dari sila keempat. Abstraksi sila tersebut menghasilkan pandangan demokrasi versi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai martabat manusia Indonesia.

Demokrasi yang termaktub di dalam tubuh sila keempat dijelmakan menjadi asas demokrasi bagi negara Indonesia. Kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial adalah sumber utama di dalam menjalankan roda demokrasi. Maka, negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah negara demokrasi monodualis, sekarang dan untuk masa yang akan datang akan tetap merupakan negara demokrasi.[39]

Pemerintahan Indonesia merupakan hasil proses demokrasi yang di dalamnya didasarkan pada nilai-nilai etika kemanusiaan manusia Indonesia. Selain itu, karena proses demokrasi juga merupakan hasil konsensus politik, maka terdapat pula legitimasi politik, kekuasan serta birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Guna menjaga stabilitas politik di dalam pemerintahan, maka diperlukan nilai-nilai etika yang berkembang baik dalam negara maupun masyarkat di mana pemerintahan itu diberlakukan. Oleh karena itu, sistem demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai etika yang berkembang dalam masyarakat, nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai-nilai agama.[40]

Keadilan Sosial

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di setiap dimensi kehidupan baik yang bersifat materil maupun spiritual. Artinya keadilan itu tidak hanya diperuntukkan untuk mereka yang berada, tetapi kepada siapa saja terlepas dari mana mereka berasal. Demikian pula dengan apa yang diusahakan, tidak hanya berupa makanan dan pakaian, tetapi juga sampai kepada kebutuhan untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa.[41] Bilamana dikembalikan kepada dasar kerohanian yang sifat kodrat manusia yang monodualis yaitu keseimbangan yang dinamis. Oleh karena itu, konsekuensinya kepentingan individu dan kepentingan umum harus dalam keseimbangan yang dinamis, yang harus sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman.[42]

Keadilan berarti bahwa setiap orang mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Jadi keadilan dalam pengertian kesamaan didasarkan pada kodratnya sebagai manusia yang

---

[38] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 294-295

[39] Kaelan, *Filsafat Pancasila*, 201

[40] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 300-301

[41] Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila,* 108

[42] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 221

tidak dapat dirampas oleh siapa pun. Masing-masing manusia berhak menentukan hidupnya sendiri-sendiri di dalam segala aspek kehidupannya. Manusia sebagai individu maupun sosial berhak mengembangkan dirinya secara maksimal. Tiap manusia berhak untuk mendapatkan suasana hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan yang sama yang melindungi upaya mereka untuk memperjuangkan yang terbaik dalam kehidupan mereka.[43]

Refleksi Nilai-Nilai Etis Islam Masade dalam Perspektif Etika Pancasila

Etika Pancasila memiliki pandangan bahwa tolak ukur dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila adalah moralitas. Etika dan moral bagi manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa bersifat rasional. Ini mengindikasikan bahwasanya etika serta moral yang terkandung pada Pancasila, tidak diletakkan untuk manusia secara pribadi, tetapi secara relasional berhubungan dengan yang lain[44], meskipun etika individual memiliki persinggungan terhadap ranah sosial. Etika Pancasila membahas hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi dan keadilan sosial serta memberi batasan-batasan moral yang menjadi latarbelakangnya. Etika Pancasila melihat hal tersebut dapat digunakan sebagai sudut pandang dalam telaah segala kebijakan yang ada di Indonesia termasuk melihat eksistensi dari *Islam Masade*.

Islam Masade sendiri adalah akulturasi dan asimilasi dari kearifan lokal Bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa yang bersumber dari kearifan lokal. Tinjauan Etika Pancasila diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap keberadaan agama-agama lokal, dalam hal ini *Islam Masade*. Kajian nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai pandangan etis diharapkan mampu memberikan pengertian dalam setiap tingkah laku kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Nilai-nilai etis yang terkandung dalam ajaran *Islam Masade* harapannya dapat dituangkan ke dalam tindakan aplikatif terutama yang menyangkut kepada hal-hal yang bernilai etis dan mengandung norma-norma sosial.

Setiap masyarakat selalu mengenal nilai dan norma etis di dalam tubuh kebudayaan mereka. Masyarakat yang notabenenya homogen dan agak tertutup-masyarakat tradisional, persoalan nilai dan norma yang ada relatif bersifat praktis dan tidak pernah dipersoalkan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tradisional di Indonesia dapat ditinjau dari aspek keseharian maupun ritual yang dilakukan. Perananan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila secara sadar atau tidak melalui

[43] Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, 143.

[44] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila.*

kebudayannya menadi teladan dan sijap yang baik untuk dicontoh masyarakat urban. Sehingga praktik nilai-nilai Pancasila tidak mengalami hambatan berarti karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut telah ada dalam diri masyarakat.[45]

Masyarakat *Islam Masade* juga memiliki ajaran yang dilandaskan pada nilai etis. Individu-individu dalam masyarakat *Islam Masade* terkadang tidak pernah berpikir lebih jauh. Nilai-nilai dan norma-norma yang dianut maksudnya hanya bersifat implisit saja, tetapi pada setiap saat bisa menjadi eksplisit. Nilai dan norma tersebut apabila ditantang atau dilanggar mengakibatkan perkembangan baru terhadap ajarannya.

Islam Masade menggagap agama adalah hal yang sakral yang diajarkan oleh Imam Masade di saat menyebarkan ajaran Islam untuk pertama kalinya di Kabupaten Sangihe. Imam Masade dianggap sakral dengan segala kekuatan magisnya yang berhasil membawa dan menyebarkan kepercayaan *Islam Masade*. Apabila berbicara mengenai nilai etis yang terkandung di dalam kepercayaan *Islam Masade*, sebenarnya tidak bisa luput dari membahas asal muasalnya. Banyak nilai dan norma etis berasal dari agama itu sendiri. Tidak dapat diragukan lagi bahwa agama merupakan salah satu sumber nilai dan norma yang paling penting. Kebudayaan merupakan suatu sumber yang lain, meski perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini kebudayaan sering kali tidak dapat dilepaskan dari agama. Inilah yang terjadi pada *Islam Masade*. Kebudayaan lokal Sangihe yang menyimpan nilai-nilai setempat bertemu dengan Islam yang juga memiliki nilai sehingga menghasilkan kepercayaan *Islam Masade*.

Konsep zuhud dan etika begitu berkaitan dalam ajaran *Islam Masade*. Peran etika bagi para memeluknya diperlukan agar tetap melaksanakan segala bentuk penghayatan sebagai bukti patuh kepada Tuhan. Indikasi tersebut adalah bukti bahwa mereka memegang teguh janji dan mendengarkan segala perintah yang telah diberikan sehingga sudah sangat jelas jika etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran *Islam Masade*. Contoh-contoh sederhana ditampilkan oleh *Islam Masade* seperti menghormati orang tua dan larangan untuk menyakiti yang tujuan utamanya guna menekankan pada perilaku agar emosi dapat dikendalikan. Lalu terdapat pula larangan untuk tidak mencuri dan menginginkan harta orang lain yang di maksudkan agar penganut ajaran *Islam Masade* tidak terlalu berpikiran materialistis dan semata-semata hidup di dunia yang didedikasikan untuk beribadah kepada Tuhan. Pada akhirnya kesempurnaan manusia menurut penganut *Islam Masade* terletak pada diri mereka sendiri yang selalu tunduk kepada Tuhan.[46]

Tinjauan nilai etis yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ajaran *Islam Masade* yang paling tepat ialah dengan

[45] Nandang Rusnandar, dkk., "Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Tradisi Hapumpung Masyarakat Dayak Ngaji di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah," *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara* 3, no. 2 (2023), 102.

[46] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan*, 98.

menggunakan sudut pandang etika Pancasila. Hal ini karena etika Pancasila merupakan kesatuan visi etika yang tertuang dalam tindakan kolektif dengan mediasi berupa simbol, nilai, dan sejarah yang berlandaskan kearifan lokal dan juga bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran *Islam Masade*. Pancasila sampai saat ini masih dan tetap diakui sebagai pandangan asli Indonesia karena hal tadi, bersumber kepada nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia atau lebih tepatnya kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila adalah vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dengan gagasan tersebut, manusia Indonesia menjalankan dan mengatur hidupnya.

Apabila ditelisik lebih dalam dengan kacamata etika Pancasila, maka sesungguhnya apa yang dipraktikkan oleh penganut *Islam Masade* sesusungguhnya berada pada keranggka etis Pancasila. Kaelan[47]mengatakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Apabila diabstrakkan dari kelima nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, maka nilai-nilai yang muncul ialah nilai religius, nilai adat-isitadat kebudayaan dan nilai kenegaraan. Di sini penulis ingin mencoba merambah lebih jauh untuk melihat menemukan ketiga nilai tersebut di dalam kepercayaan *Islam Masade* baik dari segi ajaran, konsep, hingga praktek hidup masyarakatnya.

Nilai Religius

Masyarakat *Islam Masade* sebagai pelaku agama dan budaya sudah tentu memiliki dan menjalankan suatu ritual dan tradisi yang dianggap sakral. *Islam Masade* sendiri menyebut apa itu sakral sebagai suatu hal yang memiliki benar-benar berkekuatan magis yang dipercaya memberikan kebaikan apabila dilakukan. Pada buku *Sejarah Islam di Perbatasan: Islam Masade di Kepulauan Sangir* kepercayaan tingkat tinggi tersebut disebut dengan nilai sakral. Nilai sakral ini dipercaya sebagai salah satu jembatan untuk mendamaikan agama dan budaya. Hal unik lagi yang ada pada masyarakat *Islam Masade* ialah mereka bukan sekadar mengerjakan ritual-ritual yang ada atau taklid, melainkan mereka terlebih dahulu juga harus mengetahui asal dan usul serta sumber tradisi dan ritual sakral yang telah dilakukan. Karena dengan mengetahui nilai dasar kesakralan sebuah ritual akan meningkatkan ekspresi dan kepuasan dalam melakukan peribadatan. Oleh karena itu, mereka yang sendirilah yang memposisikan prioritas utama antara ritual agama dan ritual kebudayaan yang keduanya memilki nilai sakral.

Masyarakat *Islam Masade* memiliki cara sendiri dalam memandang agama Islam. Meski mereka menyatakan bahwa keberadaan agama Islam yang kita kenal selama ini sudah berbeda dengan kepercayaan *Islam Masade*

[47] Kaelan, *Filsafat Pancasila*, 140.

yang mereka anut, tetapi mereka tetap memandang agama Islam sebagai konsep kehidupan kosmos, hubungan antarsesama, manusia dan alam, bahkan manusia dan hal gaib.[48] Faktor ini pula yang sekiranya menjadi salah satu penyebab mengapa orang-orang *Islam Masade* dapat hidup rukun dan damai dengan orang sekitar mereka yang berbeda keyakinan. Etika Pancasila sebagai sebuah sudut pandang melihat hal ini sebenarnya paktek yang tidak dapat dilepaskan dari nilai religius yang ada pada ajaran *Islam Masade*. Keyakinan yang bersumber dari penelusuran karena haus akan kebutuhan ruhani menjadikan masyarakat *Islam Masade* orang-orang yang secara praktek kehidupan bernegara sesuai dengan tuntunan Pancasila.

Masyarakat *Islam Masade* mengaggap salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang beragama adalah menemukan kedamaian hidup di dunia. Oleh karena itu, mereka dapat dikatakan sebagai kelompok manusia religius dengan agama yang begitu kental. Pandangan mereka terhadap agama dapat dikatakan berbeda dari yang lain. Konsep agama yang dipahami begitu sederhana, sehingga setiap perilaku mereka selalu berkaitan dengan pandangan terhadap konsep agama sederhana tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, mereka memandang realitas kehidupan berdasarkan pandangan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Bagi mereka, agama adalah kendaraan untuk mencapai tingkat manusia kudus dan sudah pasti akan mendapat ketenangan di dunia.[49]

Islam Masade bertolak dari kesadaran dasar manusia yang menginginkan kehidupan dengan segala aspek di dalam satu kesatuan. Di mana dalam Pancasila ini tercermin dari sikap bangsa Indonesia yang secara tegas menemukan prinsip dasar yang mempersatukan segalanya yang diklaim dalam "Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagaimana dirumuskan dalam sila pertama dari Pancasila. Bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama tersebut merupakan sikap dasar yang paling mendalam dari bangsa Indonesia.

Islam Masade menekankan bahwa ada proses yang berimbang antara dimensi tasawuf (mistisisme) dan hubungan kasih sayang antar sesama. Selain itu ia juga mengintegrasikan antara peradaban harmonis dan agama kasih sayang yang menjadi bagian terpenting dari inti ajarannya. Tesis ini sekaligus menegaskan kembali bahwa *local wisdom* tidak luput dari nilai-nilai yang diajarkan dalam *Islam Masade*.[50] Kesatuan tersebut haruslah saling integral satu sama lain. Maka, menjadi *useless* apabila jiwa mengkultuskan begitu dalam atas Tuhan tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak tercermin sikap persaudaraan dengan sesama, baik sebangsa maupun bangsa lain, dalam konteks keindonesiaan, kepada yang berbeda suku, ras, dan agama. Sehingga tidak ada artinya kepercayaan kepada

[48] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan*, 83.
[49] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan*, 83.
[50] Ichsan Nur, *Sejarah Islam di Perbatasan*, 85.

Tuhan diikrarkan kalau manusia tidak saling menghargai sebagai sesama yang sederajat. Ketidakadilan menghapus segala nilai religius yang dimiliki seorang pemeluk.[51] *Islam Masade* membongkar reduksi atas keyakinan Tuhan tersebut dengan nilai sakral yang dipercayai sebagai sebuah proses mencari agar tetap bisa menjadi Hamba Tuhan yang saling menyayangi sesama umat manusia.

Nilai adat-istiadat kebudayaan

Secara umum kehidupan masyarakat *Islam Masade* dengan masyarakat setempat terjalin dengan baik, kecuali mungkin pada masa-masa pergolakan rakyat Indonesia antara awal tahun 1970-an. Untuk mencari keamanan, mereka berafiliasi dengan partai politik milik penguasa demi mendapatkan ruang gerak dalam menjalankan segala aktivitas mereka dan juga tentunya demi menjaga eksistensi. Sikap ini diambil demi memperjuangkan status hukum mereka dan menjaga relasi dengan agama lainnya. Pandangan ini membuat orang-orang Masade melihat kehidupan sebagai sebuah jembatan untuk bertemu dengan Sang Maha Pencipta, sehingga mereka menjalankan kehidupannya dengan sederhana. Kehidupan yang tidak bergantung dengan materi dan kenikmatan dunia, bahkan mengarah sikap hedonistik dan materialistik. Hal ini sangat dihindari oleh mereka karena ketika mengikuti nafsu duniawi, maka mereka merasa tidak akan lagi mengikuti alur religi *Islam Masade*.[52]

Pandangan ini lahir karena masyarakat *Islam Masade* berhasil mendamaikan agama dan budaya. Nilai adat-istiadat kebudayaan sebenarnya dapat dilihat dari cara orang-orang Masade bersikap. Mereka meyakini apabila agama dan budaya menjadi satu kesatuan yang terikat akan menimbulkan rasa solidaritas serta saling menghargai antara satu dan lainnya sebagai sebuah keutuhan yang terangkum dalam satu rasa "persaudaraan atau *ukhuwah*".[53] Dimensi inilah yang seharusnya tidak dibawa ke dalam ranah esoterik agama, tapi dilihat dari perspektif keberadaannya sehingga eksistensi setiap manusia sebagai masyarakat tidak menimbulkan konflik atau kekacauan. Sebagaimana nilai yang termaktub dalam Pancasila yang menekankan nilai persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan tujuan menumbuhkan kebanggaan, cinta tanah air, hingga sanggup rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. *Islam Masade* sangat menekankan benar rasa solidaritas di kalangan penganutnya. Bukan hanya internal mereka sendiri, tetapi juga di luar penganut *Islam Masade*.

Pembinaan pada dimensi akhlak atau etika yang dibangun oleh masyarakat *Islam Masade* mengantarkan mereka pula pada konsep jamaah sebagai sebuah kesatuan. Mereka, orang-orang Masade, mempercayai

[51] Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila,* 106.

[52] Ichsan Nur, *Sejarah Islam di Perbatasan*, 85.

[53] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan*, 81.

bahwasanya nilai-nilai akan bermuara pada keberhasilan yang tidak hanya menyoalkan tentang sah atau tidaknya sebuah permasalahan, tetapi dapat pula dilihat dari sudut pandang lain yaitu untuk menjaga keutuhan dan persaudaraan.[54] Konsep kepedulian sosial semacam ini adalah sebuah pencitraan atas permasalahan sosial yang senantiasa bersinggungan dengan agama dan dalam hal ini konteks sosial. Dalam hubungan ini nilai-nilai yang dipraktekkan oleh masyarakat *Islam Masade* adalah penjelmaan atas nilai-nilai Pancasila yang teraktualisasi dari nilai abstrak ajaran Islam Masade yang telah disederhanakan dalam bentuk konkret pada kehidupan sehari-hari.

Nilai Kenegaraan

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, merupakan sumber nilai tertinggi dalam roda kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang bersifat kejasmanian maupun kerohanian. Hal ini mengindikasikan bahwasanya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik yang materil atau spiritual harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara bulat dan utuh.[55] Salah satunya dalam hal ihwal memilih pemimpin. Sebagaimana Indonesia yang memilih pemimpin berdasarkan asas kerakyatan yang termaktub dalam Pancasila, demikian halnya dengan para penganut *Islam Masade* dalam memilih pemimpin (imam) mereka.

Representasi seorang imam bagi pemeluk *Islam Masade* begitu besar. Mereka menghormati imam mereka selayaknya sebuah kebenaran yang harus diikuti dan dipatuhi tanpa adanya kesalahan dan cela dalam dirinya. Dalam pemilihannya, seorang Imam ditunjuk sesuai prosedur yang berlaku di tengah-tengah penganut *Islam Masade*. Sebelum penunjukkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengkaderan selama lima tahun demi memilih imam besar dan atau pembantu imam. Di struktur pemerintahan, dikenal dengan istiliah Presiden dan Wakil Presiden. Setelah melalui proses pengkaderan tersebut, maka dilakukan proses musyawarah sebagaimana umumnya untuk menentukan siapa yang paling layak dan pantas berdasarkan hasil lima tahun pengkaderan tersebut. Imam dan Pembantu Imam yang telah diangkat kemudian bekerja tanpa adanya imbalan atau gaji yang didapatkan, karena hal tersebut adalah sebuah keharusan dan kewajiban bagi para pemimpin. Hal ini juga menunjukkan bentuk keikhlasan mereka dalam penuntun para pemeluk *Islam Masade* dalam beribadah dan menyembah kepada Tuhan.

Peran Imam sangat penting dalam masyarakat Masade, oleh karena itu hal tersebut membuat mereka sangat berhati-hati dalam menunjuk pemimpin di antara mereka. Seorang imam dapat dijadikan sebagai panutan

[54] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan*, 99.

[55] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 221.

untuk para jemaat dan bahkan sebagai representasi keteladanan untuk jemaat. Dia menjadi sentral perhatian para jemaat dalam setiap berperilaku sehari-hari dan juga dalam mengambil keputusan yang bersifat prinsipil. Seorang imam adalah pemimpin yang bertanggungjawab atas jemaatnya.[56]

Kaitan Nilai-Nilai Islam Masade dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Etika Pancasila memiliki pandangan bahwa tolak ukur dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila adalah moralitas. Etika dan moral bagi manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa bersifat rasional. Ini mengindikasikan bahwasanya etika serta moral yang terkandung pada Pancasila, tidak diletakkan untuk manusia secara pribadi, tetapi secara relasional berhubungan dengan yang lain[57], meskipun etika individual memiliki persinggungan terhadap ranah sosial. Etika Pancasila membahas hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi dan keadilan sosial serta memberi batasan-batasan moral yang menjadi latarbelakangnya. Etika Pancasila melihat hal tersebut dapat digunakan sebagai sudut pandang dalam telaah segala kebijakan yang ada di Indonesia termasuk melihat eksistensi dari *Islam Masade*.

Islam Masade sendiri adalah akulturasi dan asimilasi dari kearifan lokal Bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa yang bersumber dari kearifan lokal. Tinjauan Etika Pancasila diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap keberadaan agama-agama lokal, dalam hal ini *Islam Masade*. Kajian nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai pandangan etis diharapkan mampu memberikan pengertian dalam setiap tingkah laku kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Nilai-nilai etis yang terkandung dalam ajaran *Islam Masade* harapannya dapat dituangkan ke dalam tindakan aplikatif terutama yang menyangkut kepada hal-hal yang bernilai etis dan mengandung norma-norma sosial.

Kedudukan Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara menjadikan Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup yang terjabarkan melalui dalam suatu norma yang merupakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan, bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan. Pancasila merupakan suatu *core values* berdasarkan realitas objektifnya bagi sistem etika yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara sistemik merupakan sumber nilai bagi penjabaran norma-norma berbangsa dan bernegara dalam kehidupan bersama.[58] Sebagai suatu *Philosofische grondslag* , maka posisi Pancasila bukan hanya sebagai suatu hasil konsensus, melainkan sebagai

[56] Ichsan Nur, *Sejarah Islam di Perbatasan,* 101.

[57] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*.

[58] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 65.

suatu basis filosofis yang di dalamnya rumusan sila tersebut terkandung nilai filosofis. Pancasila menjadi dasar para pendiri negara mengembangkan negara Indonesia yang merupakan negara persatuan, penganut demokrasi religius, humanis, dan berkeadilan sosial. Apabila dikomparasikan dengan konsep negara liberal, negara sosialis kelas, negara sekuler, ataupun negara theokrasi, memiliki benang merah yang sungguh sangat berbeda. Apabila negara penganut sistem liberal menekankan kebebasan individu di atas ketuhanan, negara sekuler memisahkan urusan agama dan negara, negara ateis menolak pemahaman tentang konsep bertuhan, maka Pancasila menghadirkan pemahaman kenegaraan yang khas yaitu negara yang Berketuhan Yang Maha Esa.[59]

Pancasila sebagai norma hukum positif yang dieksplesitikan melalui peraturan perundang-undangan mendasarkan pijakan moral sebagai landasan dalam pelaksanaan tata tertib hukum tersebut di Indonesia. Nilai-nilai yang hadir dalam setiap peraturan yang ditetapkan agar pelaksanaan negara sesuai dengan filosofi Pancasila. Peran Pancasila sebagai etika menjadi penting karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang bersentuhan dengan dimensi sosio-kultural-religius. Etika dan moral bagi manusia dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan senantiasa bersifat relasional. Hal ini berarti etika serta moral yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya dimaksudkan bagi manusia secara pribadi saja, tetapi juga secara relasional hubungannya dengan yang lain, manusia secara kolektif.[60]

Kearifan lokal bangsa merupakan sumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Soekarno pernah menyebutkannya dalam sidang BPUPKI bahwasanya Pancasila adalah sekumpulan nilai filosofis bangsa Indonesia yang berakar pada kearifan lokal yang ada. Segala kearifan lokal dengan beragam bentuk dan jenisnya sudah pasti berkaitan dengan karakteristik manusia Indonesia. Tesis yang muncul ialah bahwa sesungguhnya Pancasila adalah perwujudan dari manusia Indonesia itu sendiri.

Islam Masade sebagai satu dari sekian banyak kearifan lokal bangsa Indonesia tidak lepas dari sumbangsihnya terhadap bangsa Indonesia, meski cakupannya sekadar untuk masyarakat lokal Masade sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Masade sebagaimana juga yang memang sejalan dengan Pancasila menjadi pandangan hidup masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan mereka sebagai warga negara Indonesia. *Islam Masade* sebagai masyarakat yang homogen mengalami proses yang kompleks. Kehidupan yang penuh rasa kebersamaan, tolong-menolong, gotong-royong, dan saling menghargai adalah ciri khas masyarakat

[59] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 219.

[60] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 67

homogen semacam *Islam Masade*. Kekompleksitasan mereka terlihat dari gaya hidupnya yang tidak hanya bergantung pada kondisi alam, tetapi juga memanfaatkan kelebihannya untuk prospek kedepannya, terutama dalam kehidupan jasmani. Masyarakat *Islam Masade* juga tidak terlena dengan urusan duniawi. Persoalan ruhani tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Ajaran *Islam Masade* menunjukkan keharmonisan antara kultur masyarakat yang seimbang antara ruhani dan jasmani.[61]

Berdasarkan hal tersebut dan nilai-nilai yang telah ditelaah pada subbab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis hendak menganalisis lebih lanjut keterkaitan nilai-nilai yang ada dalam *Islam Masade* ke kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut coba untuk direlevansikan dengan kehidupan bangsa saat ini. Nilai yang ada akan diproyeksikan ke ranah yang lebih konkret lagi. Praktik-praktik kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin modern dan luput dari pengamalan nilai-nilai Pancasila akan coba kembali untuk ditemukan titik-titik permasalahannya dengan melakukan komparasi praktik hidup masyarakat *Islam Masade* yang kental dengan nilai kearifan lokalnya.

Relevansi Terhadap Kehidupan

Dasar moralitas dalam hubungan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, setiap pelaksana penyelenggaraan negara baik secara individual atau kolektif, baik dalam kapasitas sebagai pemimpin kelembagaan negara, sebagai wakil rakyat, sebagai tokoh atau pemimpin masyarakat harus mendasar pada moralitas Keutuhan dan Kemanusiaan. Sebagai seorang warga negara dan sekaligus sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mendasarkan pada dasar moral Ketuhanan sesuai dengan agama yang diyakini. Selain itu juga mendasarkan pada esensi kemanusiaan yang adil dan beradab. Moral keadilan dalam hubungan ini mendasarkan pada *core values* dasar ontologis bahwa manusia harus adil terhadap diri sendiri (jasmani-ruhani), adil terhadap manusia lain, masyarakat, bangsa dan negara (individu-makhluk sosial) dan adil terhadap Tuhan (sebagai pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa) bahkan manusia harus adil terhadap lingkungan hidupnya.[62] *Islam Masade* sebagai warisan leluhur dari ujung utara Indonesia telah memberikan contoh nyata dalam praktek mendasarkan moralitas kepada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai sakral yang menjadi pegangan mereka dalam beragama adalah faktor utama yang membuat masyarakat *Islam Masade* dengan sangat bijak menjalani hidup. Nilai tersebut mendasari pandangan masyarakat *Islam Masade* terhadap kehidupan bahwasanya hidup ialah jembatan untuk bertemu dengan Sang Pencipta, sehingga mereka menjalankan hidup dengan bijak

[61] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan*, 86.

[62] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 68-69.

dan sederhana. Kehidupan yang tidak bergantung pada materi dan kenikmatan dunia, bahkan mengarah ke sikap hedonistik dan materialistik.

Cara hidup yang ditunjukkan oleh masyarakat *Islam Masade* dapat dijadikan contoh bagi masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi mereka para pemangku kebijakan yang lebih dekat dengan urusan-urusan yang bersifat materialistik. Sikap religi tersebut apabila dapat diamalkan setidaknya dapat memberi kepercayaan kepada rakyat bahwa orang-orang yang menjadi perwakilan mereka adalah orang-orang yang bertugas dengan keyakinan teguh kepada Tuhannya sehingga tidak ada terpikirkan sedikitpun untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Oleh karena itu, praktik-praktik korupsi, ambisi kekuasaan, manipulasi, mafia hukum, kolusi, tindakan asusila, kezaliman dan lainnya yang merupakan manifestasi nafsu manusia dapat terminimalisir. Hal ini karena jelas-jelas tindakan tersebut bertentangan dengan dasar moralitas manusia yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai kerangka etis kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya dilaksanakan semacam ini. Nilai yang terkandung bukan berhenti pada tahap teoritis semata melainkan turut berlanjut hingga ke tahap praktis. Masyarakat *Islam Masade* meski tergolong masyarakat *pheriferi* (masyarakat pedesaan) dan masih tertinggal jauh dengan masyarakat kota kebanyakan, tapi mampu menunjukkan kehidupan yang dapat hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. Mereka cenderung menghindari konflik, bahkan dalam catatan pemerintahan, masyarakat *Islam Masade* digolongkan sebagai kelompok masyarakat teraman di Kabupaten Sangihe.[63] Jalinan tersebut dapat dilihat dari keseharian masyarakat *Islam Masade*. Mereka tidak dibatasi oleh doktrin agama ataupun kepentingan pribadi melainkan mereka hidup dengan relasi saling membutuhkan. Di sana masyarakat hidup saling menghormati dan tidak ada ketegangan dan konflik yang terjadi. Kehidupan mereka berdasarkan pada kesamaan dan kesatuan sebagai manusia yang membutuhkan satu dan lainnya dalam tataran sosiologis. Apabila direfleksikan dengan kehidupan saat ini, maka kondisi bangsa Indonesia masih jauh dari kata damai seperti apa yang dicerminkan oleh masyarakat *Islam Masade*. Sentimen agama masih kerap kali ditemukan pada masyarakat Indonesia. Isu sara turut mewarnai ragam berita yang menghiasi media. Indonesia yang seharusnya menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dengan landasan moralitas kepada Tuhan seharusnya berasas sumber kebaikan sebagai patokan standar dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat tradisional sekelas *Islam Masade* turut menjalankan praktik-praktik demokrasi. Praktik tersebut dilakukan oleh para penganutnya di mana hal ini justru sering lalai oleh masyarakat Indonesia bahkan

[63] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan,* 86.

penyelenggara pemerintah sekalipun. Semisal ketika mereka berusaha untuk mencari jalan keluar di setiap permasalahan, mereka menjadikan imam sebagai sumber utama dalam menyelesaikan masalah intern karena mereka percaya pemimpin mereka adalah orang yang amanah dan meletakkan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Apabila masalah tersebut belum dapat dipecahkan, maka mereka bukan menyalahkan satu sama lain. Mereka justru melakukan ritual sembahyang agar dapat diberi petunjuk. Konsep utama yang diusung adalah melakukan musyawarah terbuka dengan mendengarkan konflik yang terjadi di tengah-tengah penganut *Islam Masade* dan kemudian mencari titik permasalahannya dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Apabila masalah yang timbul adalah persoalan eksternal, seperti kasus dengan lembaga keagamaan, maka jalan yang mereka pilih adalah mengalah ketimbang terjadi konflik sosial yang berbau sara.[64]

Islam Masade memberi pelajaran penting bahwa agama memang merupakan sumber moralitas. Pemahaman Pancasila yang tergambar bertolak dari persamaan di antara kepelbagaian. Maksudnya semua agama mengajarkan kebaikan adalah prinsip yang harus dipegang. Cara pandang *Islam Masade* terhadap agama lain sebenarnya jika ditelaah lebih dalam, maka akan dapat ditemukan bahwa sesungguhnya Pancasila tidak menghalangi orang untuk meyakini bahwa agamanya memiliki kesempurnaan sehingga melahirkan asumsi bahsa agama yang dianut adalah sebuah kebenaran. Keyakinan semacam ini tidak menghalangi orang untuk bertoleransi maupun menghargai agama dan pemeluk agama lain. Ajaran *Islam Masade* telah membuktikannya. Ajarannya tidak menghardik mereka yang berbeda keyakninan. Mereka justru hidup berdampingan dalam satu payung kerukunan.

Dasar moralitas semacam ini sangat penting bahkan vital dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Konteks kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan bangsa serta kehidupan berdemokrasi dan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial (*social welfare and social justice*) adalah sedikit aspek yang menjadi konsen permasalahan yang ada pada bangsa ini. Negara dengan sistem yang baik sekalipun, tetapi penyelenggaranya korup, serakah, tukang fitnah, tidak amanah atau secara esensial tidak beradab maka Indonesia sebagai sebuah negara akan mengalami kerapuhan. Penanaman nilai dirasa menjadi penting, bukan sekadar doktrinisasi. Apabila belajar dari *Islam Masade* yang menekankan proses belajar mencari keyakinan kepada Tuhan, maka bangsa Indonesia dalam menumbuhkan integritas moral seseorang tidak dapat begitu saja dengan cara mendoktrin. Proses mencari dan membentuk integritas tersebut yang sering kali luput, terutama di zaman digital seperti saat ini yang serba instan.

[64] Ichsan Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan,* 105.

Nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan adalah komponen penting dalam membangun sebuah negara yang utuh di Indonesia karena prinsip negara sebagaimana yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, menunjukkan bahwa kehidupan bernegara meski didasarkan pada peraturan hukum, namun juga didasarkan pada etika. Negara Indonesia sendiri mendasarkan pada komitmen moral religius serta moral kemanusiaan yang beradab karena dalam kehidupan bernegara pada hakikatnya untuk mencapai tujuan kemanusiaan bermartabat luhur. Landasan ini penting karena merupakan asas yang bersumber dari *core values* Pancasila.[65] Nilai-nilai tersebut harus senantiasa dimunculkan terutama dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis dan langsung berdampak kepada masyarkat sebab salah satu permasalahan menonjol yang tidak bisa dipungkiri ialah hilangnya rasa percaya diri dan goyahnya jati diri serta kepribadian bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Belajar dari *Islam Masade* bisa menjadi bahan reflektif bersama untuk kembali membangkitkan nilai-nilai luhur bangsa agar bangsa Indonesia segera memiliki kepercayaan diri dan kokohnya jati diri dan identitas bangsa Indonesia seperti implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pancasila sebagai pedoman akan membentuk karakteristik manusia yang senantiasa berlaku jujur, terhormat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengemban tanggungjawab dan wewenang sebagai warga masyarakat, anak bangsa, maupun warga negara. Apabila nilai-nilai Pancasila telah dihayati dan ditransformasikan oleh para penyelenggara negara serta oleh seluruh komponen bangsa, maka harapannya stabilitas nasional dapat semakin kokoh sehingga pembangunan nasional yang bertujuan menyejahterakan rakyat dapat berjalan lancar. Sebagaimana ajaran *Islam Masade* yang memberi contoh bahwa solidaritas hadir sejalan dengan manusia yang tumbuh dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Bahkan solidaritas itu muncul di kalangan penganutnya karena sosok pemimpin yang memang dipilih secara selektif dan bekerja dengan sepenuh hati kala terpilih. Sehingga ketika pemimpin yang amanah hadir hal ini turut berpengaruh kepada aspek-aspek kehidupan lainnya. Indonesia masih kekurangan orang-orang yang rela mengorbankan dirinya dengan sepenuh hati demi bangsa dan negara. Motif kebanyakan masyarakat Indonesia terbilang hanya ingin memperkaya sendiri. Tidak heran jika tindakan kejahatan seperti korupsi, kolusi, hingga nepotisme menjadi masalah yang tidak kunjung usai. Penanaman nilai-nilai karakter menjadi penting untuk mencegah degradasi moral yang semakin marak terjadi. Berkaca dari ajaran *Islam Masade*, maka memang perlu dirumuskan strategi yang diarahkan demi terwujudnya implementasi nilai-nilai Pancasila.

[65] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 294-295.

Lasiyo[66] mengungkapkan bahwa strategi dan cara yang dapat dilakukan guna menanamkan nilai-nilai Pancasila ialah dengan menghadirkan Pancasila ke dalam aturan baku yang langsung bersinggungan dengan rakyat. Mengambil contoh *Islam Masade*, mereka mengapa begitu patuh dengan ajaran Tuhan karena mereka bersama komitmen dengan ajaran atau aturan yang ada pada ajaran mereka. Selain itu, dalam pengamalan ajaran tersebut tidak serta merta melalui dogma, melainkan melakukan proses belajar dan mencari. Poin yang setidaknya perlu digarisbawahi dan ditiru oleh penyelenggara negara. Meningkatkan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan nilai Pancasila dan meningkatkan peran kelembagaan negara yang khusus menangani implementasi nilai-nilai Pancasila juga harus sejalan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat guna ikut merasa memiliki dan berpartisipasi aktif dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Faktor lain yang perlu ditiru sosok sentral seorang imam (baca: pemimpin) di kalangan orang-orang Masade. Maka, faktor keteladanan dalam lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk suksesnya kegiatan seperti implementasi nilai-nilai Pancasila. Keteladanan itu wajib dimiliki oleh para penyelenggara negara, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama maupun keteladanan di lingkup keluarga. Terakhir, hal lain yang dapat diambil dari praktik kehidupan *Islam Masade* ialah bagaimana mereka memanfaatkan budaya setempat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan watak kerukunan. Indonesia dengan keanekaragaman dan kompleksitasnya adalah sebuah tantangan untuk mengubah *potential forces* menjadi *actual forces*–kekuatan nyata yang mampu menjawab tantangan zaman saat ini. Watak kerukunan niscaya akan mengikat ego tersebut untuk menjadi roda penggerak dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Problem Potensial dari Ajaran Islam Masade

Setiap kelompok masyarakat memiliki memiliki pegangan nilai yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Indonesia meskipun dengan prinsip *bhineka tunggal ika* tetap tidak bisa dielakkan bahwa entitas bangsa ini terdiri dari ragam multikultur dari segi sosio-kultur-religi. Demikian halnya dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Bisa jadi pada kelompok masyarakat Sumatera nilai A menjadi pegangan, tetapi pada kelompok masyarakat Sulawesi justru menjadikan nilai B sebagai pandangan hidup. Selain itu, faktor bahwa masyarakat terus mengalami perubahan karena arus perkembangan zaman juga tidak bisa dikesampingkan. Bahkan di tiap daerah memiliki standar masing-masing terhadap masyarakat mereka dalam cara memandang hidup. Sehingga problem potensial yang paling mendasar yang dapat muncul ketika nilai-nilai dari ajaran *Islam Masade* ditransformasikan ke dalam kehidupan

[66] Lasiyo, *Implementasi dan Transformasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Nasional* (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2013).

masyarakat Indonesia secara universal adalah bagaimana nilai tersebut bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun jika ditelaah, nilai-nilai yang ada dalam *Islam Masade* sesungguhnya merupakan nilai-nilai universal yang sejalan dengan isi arti Pancasila, tetapi pencampuran agama dan budaya yang terjadi pada kasus *Islam Masade* merupakan probelm potensial yang mencuat.

Pembahasan agama, budaya dan masyarakat memang tidak akan pernah selesai. Ketiganya adalah sebuah kesatuan layaknya siklus yang saling berkaitan. Agama di satu sisi merupakan pedoman hidup sebuah masyarakat yang keberadaannya tidak dapat ditolak sedangkan budaya akan terus mengakar pada kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif. Meskipun pada satu sisi, manusia yang percaya akan adanya sosok Tuhan bisa sebut orang yang beragama, tetapi di sisi lain agama juga hasil dari cara berpikir dan pola hidup. Pola dan cara berpikir yang terus berulang yang diaplikasikan di tengah masyarakat pada akhirnya akan menjadi nilai sendiri dan mendapat tempat di masyarakat.[67] Lain halnya dengan budaya yang telah banyak berpengaruh dalam membentuk ritus keberagaman masyarakat sebagai sebuah keutuhan karena dari agama lah budaya menjadi terikat sehingga tidak terjadi persinggungan dengan pedoman utama sebuah agama. Hal ini yang menjadi rawan muncul sebagai problem di kalangan masyarakat karena sering kali terjadi kerancuan di antara melihat agama dan budaya dalam sudut pandang sosiologis dan antropologi dengan sudut pandang teologi dan dogmatis. Kelemahan manusia dalam mencari kebenaran hakiki selalu mempersoalkan tentang agama dan budaya. Padahal agama dan budaya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan mengenai pencarian hakiki dan sifat transenden dari Sang Maha Benar. Oleh karena itu, wacana agama dan budaya sering mejadi problematika yang tidak pernah selesai di masyarakat.

Pandangan berbeda diungkapkan Kaelan[68] yang melihat agama secara filosofis berbeda dengan budaya karena pada hakikatnya budaya adalah hasil ciptaan, rasa dan karsa manusia. Hasil kebudayaan yang merupakan hasil karya manusia ini meliputi budaya yang sifatnya konkrit yang hanya dapat dirasakan oleh indra, maupun budaya yang berupa sekumpulan ide yang dapat dimengerti melalui pemahaman dan pikiran manusia. Oleh karena itu, Kaelan menyebutkan bahwa kepercayaan-kepercayaan termasuk produk budaya. *Islam Masade* dalam penjelasan kedua ini, maka dapat masuk klasifikasi budaya. Meski secara historis pengaruh Islam dulunya kental dengan menyusupkan nilai-nilai keislaman ke dalam ajaran *Islam Masade*, namun kenyataan bahwa *Islam Masade* dulunya merupakan produk kearifan lokal masyarakat asli Sangihe juga tidak bisa diindahkan.

[67] Chris Jenks, *Culture: Studi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 35-36.

[68] Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, 150.

Sehingga hal ini tentu saja menyisakan problem dilematis di dalam pengamalan nilai-nilai ajaran *Islam Masade* kepada masyarakat Indonesia.

Posisi *Islam Masade* sebagai sebuah kepercayaan lokal karena hasil akulturasi berada di antara dua kutub yang menemui persinggungan. Terkadang keduanya (agama dan budaya) saling tarik menarik dan menolak satu sama lain. Hal konfrontasi dapat didamaikan jika terjadi fusi dan archeisme yang berpandangan futuris. Begitupun perihal agama dan budaya yang saling mengalami singgungan ketika berhadapan. *Islam Masade* sebenarnya adalah produk damai antara agama dan budaya melalui metode pendekatan kepada ke-Esa-an Tuhan, karena hal ini adalah yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama dan budaya dengan melihat *Islam Masade* adalah sebuah kesatuan yang dikuatkan dengan perasaan yakin terhadap hal ghaib dan menjadi salah satu kepercayaan masyarakat yang disakralkan (Ichsan, 2015). Sehingga dalam penempatan *Islam Masade* sebagai sebuah nilai yang diamalkan harus hati-hati agar tidak menimbulkan kekhilafan religius secara filosofis.

Kesimpulan

Pertama, ajaran *Islam Masade* di Kepulauan Sangihe adalah hasil akulturasi antara kearifan lokal setempat dengan Islam Universal. Keberadaan *Islam Masade* ada karena disebarkan oleh Mawu Masade utusan dari kerajaan Kendahar.

Kedua, inti dari ajaran *Islam Masade* ialah mengesahkan Tuhan sebagai Pencipta. Artinya segala bentuk aktivitas di dunia disandarkan dengan aturan-aturan Tuhan yang disampaikan melalui Imam Masade, pembawa ajaran *Islam Masade*. Selain membangun hubungan vertikal berupa keyakinan transenden kepada Tuhan, ajaran *Islam Masade* juga dituntut menyeimbangkannya dengan kehidupan di dunia yakni senantiasa menjaga solidaritas antara sesama manusia.

Ketiga, Etika Pancasila sebagai sebuah kerangka etis kehidupan bermasyarakat merupakan pedoman bertingkah laku yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah landasan hidup bagi setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari penyelenggara pemerintah hingga rakyat biasa. Isi arti sila-sila Pancasila yang abstrak umum universal adalah penjelmaan dari etika Pancasila.

Keempat, nilai-nilai yang dapat dipetik dari ajaran *Islam Masade* yang sesuai dengan perspektif etika Pancasila yaitu nilai religi, nilai adat-istiadat kebudayaan, dan nilai kenegaraan. Nilai-nilai tersebut bersumber dari ajaran *Islam Masade* yang berkenaan dengan isi arti sila-sila Pancasila yang abstrak umum universal.

Kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran *Islam Masade* yang relevan pada kehidupan berbangsa dan bisa dijadikan contoh yakni, proses meyakini Tuhan bukan semata-semata proses dogmatis melainkan merupakan usaha pencarian secara terus menerus sehingga menghadirkan

keyakinan transenden secara utuh kepada Tuhan yang membuat siapa saja yang meyakini adanya Tuhan enggan melakukan tindakan kejahatan. Kemudian mengedepankan solidaritas bersama dan kerukunan sehingga di dalam menyelesaikan segala persoalan senantiasa mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan. Terakhir, setiap orang adalah pemimpin dan punya kesempatan yang sama untuk memperoleh status pemimpin dalam ranah struktural, maka tidak boleh sembarangan dalam memilih pemimpin. Ada proses yang matang demi memunculkan pemimpin yang berkualitas.

Keenam, problem potensial yang sekiranya dapat terjadi ialah penerimaan terhadap keberadaan *Islam Masade*. *Islam Masade* yang merupakan agama dan budaya sekaligus memiliki beberapa pandangan terkait eksistensinya bahwa agama dan budaya adalah dua entitas yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan persepsi bahwa nilai-nilai yang dianut oleh ajaran *Islam Masade* tidak cocok diamalkan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Bagir, Zainal Abidin (Ed.) *Pluralisme Kewargaan.* Bandung: Mizan, 2011.

Dewantara, Agustinus W.*, Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini.* Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Hadi, Hardono. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Ichsan, Nur. *Sejarah Islam di Perbatasan: Islam Masade di Kepulauan Sangir*. Yogyakarta: Kepel Press, 2015.

Jenks, Chris. *Culture: Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kaelan, *Etika Kehidupan Berbangsa Prinsip-Prinsip Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2018.

Kaelan, *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2018.

Lahindah, Patur Rahman, Albert W. S. Kusen, dan Nasrun Sandiah, "Islam Masade Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Holistik* 11, no. 21 (2018): 1-21.

Lasiyo. *Implementasi dan Transformasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2013.

Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan.* Jakarta: Mizan, 2017.

Naibaho, Linton, Rahma Dhani Fitria Sinaga, dan Wulan Ayu Trisna, "Ontologi Filsafat Pancasila Di Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang," *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3, no 2 (2023): 22 – 31.

Riyanto, Armada, dkk., *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat "Keindonesiaan",* Yogyakarta: Kanisius, 2021.

Rusnandar, Nandang, B Basori, Suwardi Alamsyah, dan Lina Herlinawati, "Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Tradisi Hapumpung Masyarakat Dayak Ngaju Di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah," *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara* 3, no. 2 (2023): 99 – 112.

Setiardja, Gunawan. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Soeprapto, Sri. *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.

Tobing, Dian Uli Anatasia, Bila May, Nadila dan Nadila Septiani Ritonga, "Filsafat Pancasila Dalam Konsep Filosofis "Dalihan Na Tolu" Masyarakat Adat Batak Toba," *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3, no. 2 (2013): 32 – 41.

Yohan M.Si, Dr. "Kata Pengantar: Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI" dalam *Imajinasi Nusantara: Budaya Lokal dan Pengetahuan Tradisional dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer* diedit oleh Arif Susanto, dkk., Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, 2021.